

ASINKRONISASI TRANSFORMASI PRODUKSI DI KABUPATEN SUKOHARJO

Agung Riyardi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

The best economic development is appropriate economical development to community self-identity. The experience of Sukoharjo regency which follow capitalistic national development pattern precisely causes agricultural self identity of Sukoharjo regency decrease and in the future it will possibly disappear.

The strategic and short term solution in overcoming capitalistic development and in returning self identity of Sukoharjo regency are local governmental one-sidedness with agricultural sector. The real implementations of the one-sidedness are agricultural intensification policy, agricultural extensification policy, and product focus policy. From agricultural intensification policy, it is hoped that local government develops the distribution system of welfare agricultural intensification product. From Agricultural extensification policy, local government is hoped make local regulation of lied-idle field using, and from production policy focus of local government of Sukoharjo Regency, it has to focus on outstanding agricultural product so that it creates agroindustry.

Keywords: *kapitalisme, transformasi produksi, intensifikasi, agroindustri*

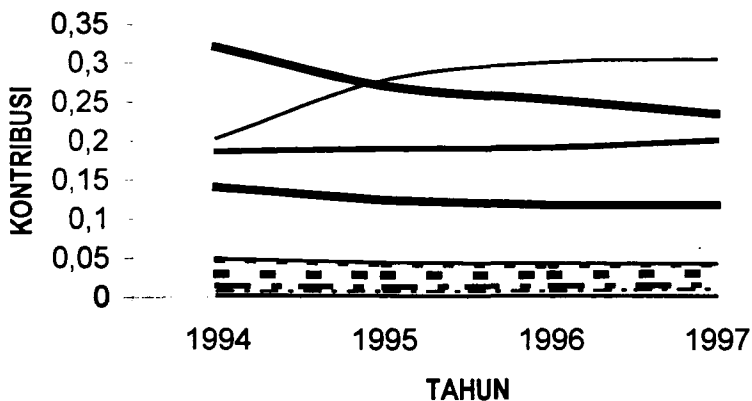
DAMPAK NEGATIF KAPITALISME

Asumsi dasar sistem ekonomi kapitalisme adalah *trickle down effect*, yaitu pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemerataan. Konsekuensi logis dari asumsi tersebut, sistem ekonomi kapitalisme berusaha meningkatkan pertumbuhan dengan cara memperbanyak produksi, (*to produce, to produce, and to produce*). Dan karena perbanyak produksi membutuhkan modal (kapital), maka akan terlihat bahwa sektor produksi yang dekat dengan modal, yaitu sektor

sekunder dan tersier akan mengalami peningkatan kontribusi, sedangkan sektor primer akan mengalami penurunan kontribusi.

Di kabupaten Sukoharjo, fakta tersebut dapat diketahui melalui perkembangan PDRB mulai tahun 1993 hingga 1997, di mana apabila dilihat dari *harga berlaku*, PDRB kabupaten Sukoharjo berkembang secara eksponensial, namun apabila dilihat dari *harga konstan*, mengalami *diminishing return*. Penyebab dari *diminishing return* ini adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Sebenarnya, sektor pertanian, bersama sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa merupakan pemberi kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo. Namun berbeda dengan sektor industri pengolahan dan jasa-jasa yang kontribusi mereka selalu meningkat, sektor pertanian justru mengalami penurunan. (Dalam grafik terlihat melalui garis tebal menurun)

Grafik 1. Kontribusi yang Menurun dari Sektor Pertanian



Yang lebih 'mengejutkan' lagi, apabila kondisi tersebut masih berlanjut, maka posisi sektor unggulan di kabupaten Sukoharjo akan berubah dari keunggulan pada sektor pertanian, menjadi keunggulan pada sektor industri pengolahan dan sektor-sektor terkait (Sektor hotel, perdagangan, dan restoran dan sektor jasa). Hal itu dapat kita ketahui dari tabel berikut ini:

**Tabel 1. Sektor Unggulan Sebelum Krisis, Setelah Krisis,
dan Yang Akan Datang**

Sektor Ekonomi	Kontribusi thd PDRB	Sblm Krisis	Stlh krisis	Yang akan Datang
Pertanian	0.269686	B	B	T
Pertambangan dan Penggalian	0.014747	B	B	T
Industri Pengolahan	0.271277	T	T	B
Listrik, Gas dan Air Minum	0.008619	T	T	T
Bangunan / Konstruksi	0.043429	T	T	T
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.192306	T	B	B
Pengangkutan dan Komunikasi	0.029511	T	T	T
Keuangan, sewa dan jasa perusahaan	0.04506	T	B	T
Jasa-jasa	0.125357	B	B	B

B = Unggulan, T = Bukan unggulan

Sumber : Riyardi, Agung, 2001

Padahal, sektor pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk kabupaten Sukoharjo. Laporan ASPM kabupaten Sukoharjo tahun 1999/2000 dan tahun 2000 menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor jasa-jasa merupakan sektor penyerap tenaga kerja paling banyak. Di mana, yang paling banyak nomor dua menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian.

Demikian juga dilihat dari segi geografis, maka kabupaten Sukoharjo adalah daerah yang cocok untuk daerah pertanian, sebab terletak pada $110^{\circ} 57' 33,70$ Bujur Timur dan $110^{\circ} 42' 06,79$, Bujur Timur serta $7^{\circ} 32' 17,00$ Lintang Selatan dan $7^{\circ} 49' 32,00$ Lintang Selatan, dengan ketinggian berkisar antara 89 meter dpl sampai 125 meter dpl.

Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor Tahun 1998 – 1999

No	Sektor	Tahun (orang)	
		1998	1999
1	Perdagangan, hotel, dan restoran	87582	88167
2	Pertanian	76950	87218
3	Industri Pengolahan	76792	79934
4	Jasa-jasa	50258	59040
5	Sektor lain	46412	38888

Sumber: ASPM kabupaten Sukoharjo, 1999/2000 dan 2000

PROBLEMA SEKTOR PERTANIAN

Sebenarnya, menurunnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya peranan industri pengolahan merupakan hal yang lazim dalam transformasi produksi. Thomas P. Tomich dkk, dalam Meier (1994), mengemukakan bahwa perubahan paling mendasar dalam transformasi produksi adalah penurunan peranan sektor pertanian dan makin tingginya peran sektor industri manufaktur. Sedangkan Engel, sebagaimana dikemukakan Arsyad (1985), berargumentasi mengenai kelaziman transformasi struktural berdasarkan alasan pergeseran permintaan. Menurut Engel, dengan asumsi terjadi pertumbuhan, maka permintaan masyarakat akan bergeser dari barang primer (makanan) ke barang nonprimer (industri). Dengan demikian, secara pasti peran sektor pertanian menurun sedangkan peran sektor manufaktur meningkat. Sedangkan Muhammad Arsyad Anwar, dalam Rachbini (1994), menambahkan argumentasi perubahan faktor produksi-perkembangan teknologi dan spesialisasi untuk memperkuat argumentasi kelaziman transformasi produksi.

Namun penurunan tersebut menimbulkan permasalahan dengan alasan :

- a. Sektor pertanian terkait dengan kehidupan sebagian besar masyarakat. Bahkan sektor pertanian merupakan bagian integral dari ketahanan negara, yaitu melalui *food security* (ketahanan pangan). Apabila sektor tanaman pangan mengalami penurunan dan rendahnya hasil produksi, maka kebutuhan pokok berupa makanan tidak terpenuhi (dari dalam negeri). Untuk menutupi kekurangan produksi, dilakukan dengan mengimpor kebutuhan

pokok pangan dari luar negeri. Dikhawatirkan, impor kebutuhan pokok pangan tersebut menurunkan *bargaining power* negara importir terhadap negara pemasok kebutuhan pokok pangan.

- b. Di dalam sektor pertanian sendiri, masih terdapat hal-hal yang perlu dipecahkan, yang muara permasalahannya, menurut Mubyarto, 1999, terdapat pada pembangunan sektor pertanian yang tidak berkelanjutan. Lebih lanjut, Mubyarto mengemukakan tengara pembangunan pertanian yang tidak berkelanjutan terdapat pada dua hal *pertama* merosotnya harga hasil produksi sementara biaya produksi meningkat (misalnya pada pertanian padi dan tebu). *Kedua* terlalu sedikitnya fakta keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian, terutama apabila dikomparasikan dengan keberpihakan terhadap sektor manufaktur.

PENGUATAN SEKTOR PERTANIAN

Dr. Samith Athif Az Zai'in, 1981, mengemukakan bahwa politik pertanian meliputi tiga hal, yaitu intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, dan fokus produksi pertanian. Intensifikasi pertanian yang intinya adalah untuk mengatasi masalah rendahnya produksi pertanian dapat dilakukan dengan penggunaan bibit unggul, pupuk dan obat pemberantas hama, sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada revolusi hijau (Repelita I dan Repelita II Indonesia). Yang perlu dicermati, adalah model distribusi bibit unggul, pupuk, dan obat pemberantas hama, untuk sampai kepada petani dari produsen adalah melalui mekanisme pasar yang tidak adil. Mubyarto, 1999, mengemukakan sebagai berikut :

“Dalam pertanian rakyat, revolusi hijau yang membuka peluang petani kecil untuk mengadopsi berbagai teknologi biologi dan kimia yang unggul ternyata juga telah dijadikan ajang “pengerukan keuntungan” perusahaan-perusahaan obat-obatan dan pupuk kimia “modern”. Perusahaan modern “agribisnis” dan “agroindustri” ini melalui koneksi dengan pejabat-pejabat pemerintah dengan berbagai cara ‘berbisnis’ dengan petani padi dan tanaman pangan lain dengan meraup keuntungan besar”

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, adalah melakukan inovasi terhadap sistem distribusi input pertanian yang hanya ber-

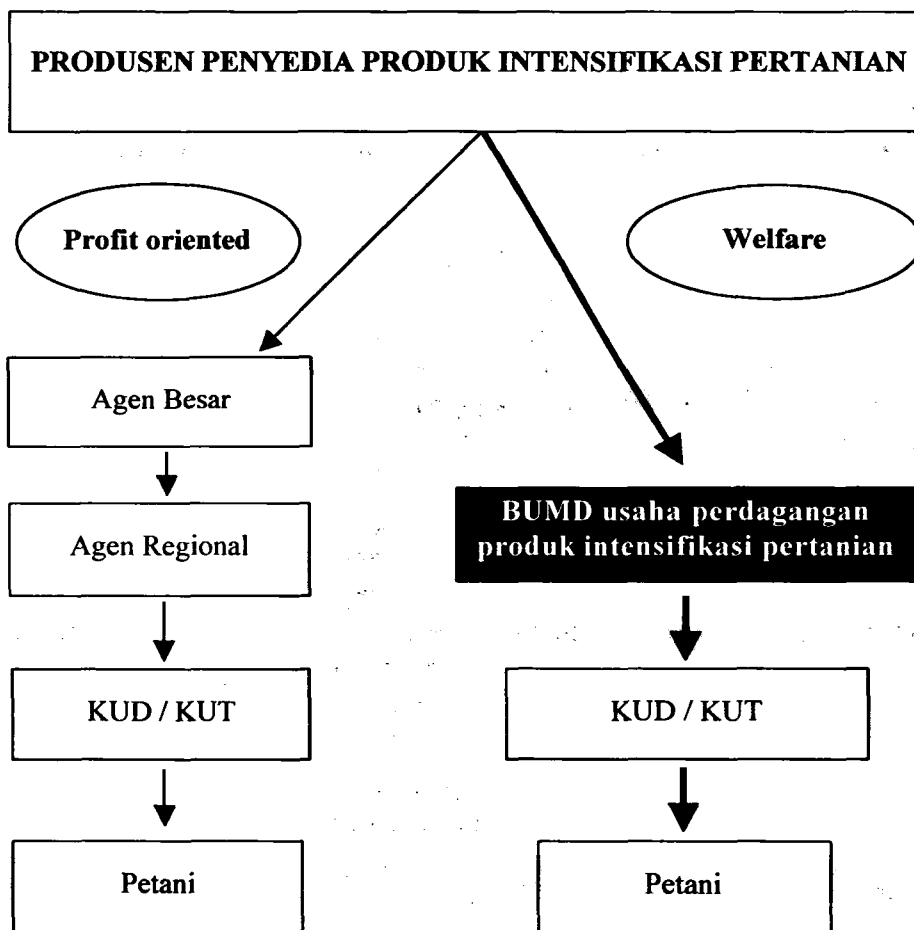
dasarkan mekanisme pasar. Inti inovasi tersebut adalah memperkuat keberpihakan pemerintah. Memang selama ini pemerintah pusat telah melakukan berbagai macam subsidi, misal subsidi pupuk, obat-obatan, kredit atau penetapan harga dasar gabah. Namun cara-cara tersebut justru memperkuat kalangan pemodal industri pertanian dan pedagang besar industri pertanian dan bukannya memperkuat posisi ekonomi para petani, sebab merekalah yang menikmati subsidi. Oleh karena itu, keberpihakan yang lebih realistis dapat diambil pemerintah daerah. Misalnya saja dalam bentuk BUMD pertanian. Badan usaha ini adalah milik pemerintah yang berusaha mencukupi kebutuhan intensifikasi pertanian di kabupaten Sukoharjo melalui perdagangan, misalnya bibit unggul, pupuk, dan lain-lain. BUMD pertanian membeli kebutuhan intensifikasi pertanian langsung dari produsen produk industri intensifikasi pertanian dan menyalurkannya kepada petani. Di mana bagi petani kecil/miskin, penyaluran tersebut tidak melalui mekanisme pasar, namun merupakan perlakuan khusus, yaitu hibah.

Akan terasa lebih bermanfaat lagi apabila BUMD pertanian tersebut merupakan *syirkah* (kerja sama ekonomi) antara pemerintah daerah dengan KUD/KUT dan masyarakat petani di kabupaten Sukoharjo. Di mana apabila terdapat keuntungan dari BUMD pertanian, akan dibagi di antara Pemerintah daerah, KUD/KUT dan masyarakat petani. Dan di sisi lain, pola distribusi produk intensifikasi pertanian, dari atas hingga ke bawah tidak lagi *profit oriented*, namun *welfare oriented* sebagaimana nampak dalam gambar 1.

Adapun usaha ekstensifikasi dapat dilakukan dengan memperbanyak lahan pertanian. Namun, sebenarnya ekstensifikasi seperti itu, kurang dapat dilaksanakan di kabupaten Sukoharjo, mengingat terbatasnya luas kabupaten Sukoharjo. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan 'menghidupkan kembali' lahan yang sudah ter'konservasi' menjadi lahan nonpertanian, namun pada saat ini belum dimanfaatkan. Di sekitar kecamatan Kartosuro dan kecamatan Grogol, misalnya, banyak dijumpai lahan menganggur yang belum dimanfaatkan. Dalam hal ini, mungkin diperlukan suatu peraturan daerah yang memperbolehkan pemerintah daerah meminjam lahan menganggur tersebut dari pemiliknya dan menggunakan lahan menganggur tersebut untuk kepentingan pertanian daerah, misalnya memberikan lahan pertanian kepada petani gurem dan petani miskin, yang pada akhirnya melepas-

kan petani miskin dan petani gurem dari jerat sewa lahan pertanian yang merugikan.

Gambar 1. Jalur Distribusi Produk Intensifikasi Pertanian



KETERKAITAN SEKTOR INDUSTRI DENGAN SEKTOR PERTANIAN

Sektor industri, sebenarnya merupakan 'anak' dari sektor pertanian, di mana perkembangan sektor pertanianlah yang memunculkan sektor industri. Argumentasi tersebut mendasarkan pada pendapat Engel, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pertumbuhan

sektor pertanian, menyebabkan meningkatnya kebutuhan produk industri.

Di kabupaten Sukoharjo, pola tersebut tidak terlihat. Sektor industri bukan 'anak' sektor pertanian. Sebab kemunculan dan berkembangnya sektor industri -- tidak hanya di kabupaten Sukoharjo, namun di seluruh Indonesia -- tidak dimulai dari berkembangnya sektor pertanian. Sektor industri muncul sebagai salah satu penyelesaian masalah perekonomian nasional, yaitu mobilisasi dana melalui masuknya devisa dan Penanaman modal asing. Oleh karena itu, industri manufaktur di kabupaten Sukoharjo banyak yang merupakan industri berbasis ekspor. Pada tahun 1998, misalnya, industri tekstil di kabupaten Sukoharjo berhasil mengekspor US\$ 111.114.847,00. Demikian juga industri kecil dan menengah potensial di kabupaten Sukoharjo, tidak terkait dengan peningkatan sektor pertanian. Orientasi perdagangan mereka adalah luar daerah atau bahkan ekspor. Akibatnya, sektor industri di kabupaten Sukoharjo telah menyedot kemajuan sektor pertanian, misalnya melalui penyerapan tenaga kerja dan perubahan lahan.

Untuk memunculkan sektor industri yang merupakan 'anak kandung' sektor pertanian, pilihan 'moderat'nya adalah agroindustri, atau industri pertanian. Secara teoritis, Jhingan, M.L, 1983, mengemukakan bahwa urutan perkembangan sektoral haruslah dimulai dengan sektor pertanian, **sektor agroindustri**, sektor industri, dan sektor jasa. Agroindustri merupakan jembatan munculnya sektor industri yang merupakan 'anak' sektor pertanian.

Adapun dasar pengembangan agroindustri di kabupaten Sukoharjo sebaiknya bertumpu pada politik intensifikasi pertanian sebagaimana yang ditawarkan oleh Samith Athif Az-Zein, yaitu politik fokus prioritas produksi.

Wajdi, Farid, 2000, merekomendasikan fokus prioritas produksi sektor pertanian di kabupaten Sukoharjo pada (1) pertanian tanaman pangan padi, tanaman sayuran semangka dan melon, tanaman buah-buahan mangga, pisang, dan mlinjo, (3) perkebunan kelapa, jambu mete, tembakau, empon-empon (tanaman obat-obatan), dan kapok randu, (4) peternakan sapi, domba/kambing, dan ayam.

Sektor-sektor tersebut, harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan agroindustri.

Perkebunan empon-empon, misalnya diharapkan mampu memunculkan home industri obat-obatan (jamu) Jawa sebagaimana yang sudah berkembang di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Sukoharjo. Atau -- yang masih menjadi impian --, memunculkan agroindustri produk hortikultura.

PENUTUP

Jati diri masyarakat Indonesia termasuk kabupaten Sukoharjo bukanlah masyarakat kapitalisme. Dan pembangunan masa lalu yang ternyata 'mencelakakan' seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk lebih mementingkan pembangunan yang berdasarkan jati dirinya sendiri daripada sekadar mengadopsi model pembangunan dari masyarakat lain.

Secara teknis, pembangunan berdasarkan jati diri tersebut, dilakukan dengan menarik sektor industri ke agroindustri. Diharapkan tarikan tersebut, mengembangkan sektor pertanian dan menghilangkan sifat eksploitatif sektor industri terhadap sektor pertanian. Dan bentuk akhir dari teknis pembangunan berdasarkan jati diri tersebut adalah peningkatan kontribusi sektor pertanian dan industri secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

ASPM Kabupaten Sukoharjo. 1999/2000

ASPM Kabupaten Sukoharjo. 2000

Basri, Faisal, H., dkk. 1997. *Kontroversi Kebijakan dan Ilusi Efisiensi*, Jakarta: INDEF.

Chapra Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: GIP.

Hill, Hal, 1996. *Transformasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: PAU (Studi Ekonomi) UGM dan Tiara Wacana,

Jhingan, ML. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Meier, G., M. 1994. *Leading Issues in Economic Development*. New York: Oxford University Press.

- Mubyarto. 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Rachbini, Didik, J. (Ed.). 1994. *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Riyardi, Agung. 2001. *Analisis dan Evaluasi Keadaan PDRB dan Pembangunan Sektoral Kabupaten Sukoharjo Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi*. Laporan Penelitian, Litbang UMS.
- Samith Athif Az-Zein. 1991. *Syariat Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik, dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan*, Bandung: Husaini.
- Wajdi, Farid. 2000. *Laporan Studi Tentang Potensi, Prospek, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo*, Laporan Penelitian. Bappeda Sukoharjo.